

Teologi Pembebasan dan Psikologi Humanistik: Rekonstruksi Paradigma Masyarakat Tanpa Penindasan

Khadijah Nawal Marami¹, Fakia Melyatus Sadilah², Ahmad Faizin³,
Ali Hasan Siswanto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

E-mail : khadijahnawal846@gmail.com, fakiamelyatussadilah@gmail.com, ahmadfaizin8877@gmail.com,
alihan_siswanto@uinkhas.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 15, 2026

Accepted May 18, 2026

Keywords:

Liberation Theology; Society Without Oppression; Humanistic Psychology; Carl Rogers; Social Transformation; Human Dignity; Islamic Social Ethics.

ABSTRACT

The reality of oppression in contemporary society remains a fundamental issue, even as the discourse on democracy, human rights, and social justice continues to evolve in the global arena. Various forms of structural inequality, the dominance of power, and social marginalization demonstrate that modernity has not yet fully succeeded in creating a society free from oppression. In academic studies, efforts to understand and address oppression often emphasize structural-political or economic approaches, while the dimension of human consciousness transformation both spiritual and psychological remains relatively neglected. This research gap indicates that the integration of theological perspectives with humanistic psychological approaches within the framework of social change has yet to be developed conceptually and systematically. This article aims to reconstruct the paradigm of a society free from oppression through the integration of transformative theology within the Islamic tradition and Carl Rogers' humanistic-existential psychology. Theoretically, this study employs an interdisciplinary approach that combines concepts of liberation theology, Islamic social ethics, and principles of humanistic psychology such as empathy, relational authenticity, and unconditional positive regard. This study employs a qualitative method using a library research approach and a conceptual-critical analysis of literature in theology, social philosophy, and psychology. The main argument of this article is that the creation of a society free from oppression requires not only a transformation of social structures but also a change in human moral, spiritual, and psychological consciousness. The integration of theological principles and humanistic psychology enables the formation of a social paradigm that positions humans as dignified, free subjects capable of authentically developing their existential potential. The scientific contribution of this research lies in the development of a new conceptual model that links transformative theology with humanistic psychology as an epistemological foundation for the construction of a just, humanistic, and oppression-free society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 15, 2026

Accepted May 18, 2026

ABSTRACT

Realitas penindasan dalam masyarakat kontemporer masih menjadi persoalan fundamental meskipun wacana demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial semakin berkembang dalam diskursus global. Berbagai bentuk ketimpangan struktural, dominasi kekuasaan, dan marginalisasi sosial menunjukkan bahwa modernitas belum sepenuhnya mampu melahirkan masyarakat yang bebas dari

Keywords:

Teologi Pembebasan;
Masyarakat Tanpa Penindasan;
Psikologi Humanistik; Carl
Rogers; Transformasi Sosial;
Martabat Manusia; Etika Sosial
Islam.

penindasan. Dalam kajian akademik, upaya memahami dan mengatasi penindasan sering kali lebih menekankan pendekatan struktural-politik atau ekonomi, sementara dimensi transformasi kesadaran manusia, baik secara spiritual maupun psikologis, masih relatif kurang diperhatikan. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara perspektif teologis dan pendekatan psikologi humanistik dalam kerangka perubahan sosial masih belum banyak dikembangkan secara konseptual dan sistematis. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma masyarakat tanpa penindasan melalui integrasi antara teologi transformatif dalam tradisi Islam dan psikologi humanistik–eksistensial Carl Rogers. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan konsep teologi pembebasan, etika sosial Islam, serta prinsip-prinsip psikologi humanistik seperti empati, keaslian relasional, dan *unconditional positive regard*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis konseptual-kritis terhadap literatur teologi, filsafat sosial, dan psikologi humanistik kontemporer. Argumen utama artikel ini adalah bahwa penciptaan masyarakat tanpa penindasan tidak hanya memerlukan transformasi struktur sosial, tetapi juga perubahan kesadaran moral, spiritual, dan psikologis manusia. Integrasi antara spirit teologi dan psikologi humanistik memungkinkan terbentuknya paradigma sosial yang menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat, bebas, dan mampu mengembangkan potensi eksistensialnya secara autentik. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual baru yang menghubungkan teologi transformatif dengan psikologi humanistik sebagai fondasi epistemologis bagi pembangunan masyarakat yang adil, humanistik, dan bebas dari penindasan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Pandya Fadil Mumpintoro
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia
E-mail: pandyafadil11@gmail.com

PENDAHULUAN

Realitas penindasan dalam masyarakat kontemporer merupakan salah satu persoalan fundamental yang terus menjadi perhatian dalam diskursus ilmu sosial, teologi, dan filsafat moral. Meskipun modernitas ditandai oleh perkembangan demokrasi, globalisasi nilai hak asasi manusia, dan kemajuan ilmu pengetahuan, berbagai bentuk ketimpangan struktural dan dominasi sosial tetap berlangsung dalam sistem ekonomi, politik, maupun budaya. Ketidakadilan sosial tidak hanya hadir dalam bentuk eksploitasi ekonomi atau marginalisasi politik, tetapi juga dalam bentuk penindasan simbolik dan psikologis yang memengaruhi kesadaran manusia tentang dirinya dan posisinya dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, penindasan tidak sekadar dipahami sebagai fenomena struktural, melainkan juga sebagai pengalaman eksistensial yang memengaruhi martabat dan kebebasan manusia sebagai subjek moral. Tradisi pemikiran teologis dalam Islam, misalnya, menempatkan keadilan (*al-‘adl*) dan martabat manusia (*karāmah al-insān*) sebagai fondasi etika sosial yang menolak segala bentuk dominasi dan ketidakadilan. Dengan demikian, persoalan penindasan tidak hanya

merupakan problem sosial-politik, tetapi juga problem teologis dan antropologis yang berkaitan dengan bagaimana manusia memahami kebebasan, tanggung jawab moral, dan tujuan eksistensinya dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, perdebatan tentang masyarakat tanpa penindasan tidak dapat dilepaskan dari upaya merekonstruksi paradigma etika sosial yang mampu mengintegrasikan dimensi struktural, spiritual, dan psikologis dalam memahami perubahan masyarakat.

Dalam perkembangan literatur akademik mutakhir, berbagai pendekatan telah digunakan untuk memahami relasi antara struktur sosial dan pembebasan manusia. Dalam bidang psikologi, misalnya, pendekatan humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan inheren menuju pertumbuhan dan aktualisasi diri apabila berada dalam lingkungan sosial yang mendukung perkembangan tersebut. Perspektif *person-centered approach* yang dikembangkan Rogers menekankan pentingnya empati, keaslian relasional (*congruence*), dan penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*) sebagai kondisi psikologis yang memungkinkan individu berkembang secara autentik dan bebas dari tekanan struktural maupun psikologis. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan humanistik Rogers tidak hanya relevan dalam praktik psikoterapi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas, khususnya dalam membangun lingkungan sosial yang memungkinkan pertumbuhan manusia secara kolektif. Dalam kajian psikologi kontemporer, misalnya, Stephen Joseph menunjukkan bahwa pendekatan *person-centered* menegaskan bahwa perubahan manusia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan individu, melainkan sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan potensi manusia. (Joseph, 2021) Dengan kata lain, perubahan sosial tidak hanya bergantung pada transformasi struktur eksternal, tetapi juga pada kualitas relasi sosial yang memungkinkan individu berkembang secara bebas dan bermartabat. Dalam perkembangan literatur terbaru, para sarjana juga mulai menyoroti dampak sosiokultural pemikiran Rogers dalam membentuk apa yang disebut sebagai *therapeutic culture*, yakni sebuah paradigma sosial yang menempatkan pertumbuhan psikologis dan keaslian eksistensial sebagai nilai utama dalam kehidupan manusia modern. (Joseph, 2021) Perspektif ini membuka kemungkinan dialog interdisipliner antara psikologi humanistik, filsafat eksistensial, dan teologi dalam memahami proses pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan sosial.

Namun demikian, meskipun literatur tentang teologi pembebasan, perubahan sosial, dan psikologi humanistik berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kajian akademik yang mengintegrasikan ketiga bidang tersebut masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian tentang penindasan sosial lebih banyak berfokus pada analisis struktural dalam bidang ekonomi politik atau teori kritis, sementara kajian teologis cenderung menekankan dimensi normatif dan moral dari keadilan sosial. Di sisi lain, pendekatan psikologi humanistik sering kali dipahami sebagai pendekatan individualistik yang berfokus pada perkembangan pribadi tanpa mempertimbangkan secara memadai konteks sosial dan politik yang membentuk pengalaman manusia. Fragmentasi epistemologis ini menciptakan kesenjangan penelitian yang signifikan dalam studi interdisipliner tentang pembebasan manusia. Beberapa penelitian terbaru mulai menunjukkan potensi integrasi antara psikologi humanistik dan tradisi pemikiran keagamaan dalam memahami perkembangan manusia secara holistik, khususnya dalam konteks pendidikan dan spiritualitas (Dewi & Fauzi, 2025). Namun, kajian tersebut masih terbatas pada dialog konseptual dalam bidang pendidikan atau psikoterapi dan belum secara sistematis mengembangkan kerangka teoretis yang menghubungkan psikologi humanistik dengan proyek transformasi sosial menuju masyarakat tanpa penindasan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pendekatan konseptual baru yang mampu mengintegrasikan perspektif teologis, psikologis,

dan sosial dalam memahami proses pembebasan manusia dari struktur penindasan yang kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berangkat dari pertanyaan penelitian utama: bagaimana paradigma masyarakat tanpa penindasan dapat direkonstruksi melalui integrasi antara teologi transformatif dan psikologi humanistik-eksistensial Carl Rogers? Pertanyaan ini menjadi penting karena proyek pembebasan manusia tidak hanya memerlukan perubahan struktur sosial, tetapi juga transformasi kesadaran manusia sebagai subjek moral dan eksistensial. Artikel ini berargumen bahwa masyarakat tanpa penindasan hanya dapat terwujud apabila perubahan struktural dalam masyarakat disertai dengan transformasi kesadaran manusia yang menempatkan martabat, kebebasan, dan empati sebagai fondasi relasi sosial. Dalam perspektif ini, teologi transformatif menyediakan kerangka normatif tentang keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab moral, sementara psikologi humanistik Rogers memberikan pemahaman tentang kondisi psikologis yang memungkinkan manusia berkembang secara autentik dalam relasi sosial yang non-dominatif. Integrasi kedua perspektif tersebut memungkinkan lahirnya paradigma baru tentang perubahan sosial yang tidak hanya berorientasi pada transformasi struktur kekuasaan, tetapi juga pada pembangunan lingkungan sosial yang memungkinkan berkembangnya potensi kemanusiaan secara penuh. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada upaya merekonstruksi paradigma masyarakat tanpa penindasan melalui pendekatan interdisipliner yang menghubungkan teologi, filsafat eksistensial, dan psikologi humanistik. Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada integrasi konseptual antara teologi pembebasan dan psikologi humanistik, tetapi juga pada pengembangan model teoritis yang menempatkan transformasi kesadaran manusia sebagai prasyarat utama bagi terciptanya masyarakat yang adil, humanistik, dan bebas dari penindasan.

KERANGKA TEORITIS

Pembahasan mengenai masyarakat tanpa penindasan tidak dapat dilepaskan dari refleksi teoritis tentang relasi antara manusia, kekuasaan, dan struktur sosial yang membentuk kehidupan kolektif. Dalam perspektif filsafat sosial modern, penindasan sering dipahami sebagai konsekuensi dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Pemikiran Michel Foucault, misalnya, menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi juga melalui jaringan diskursif yang membentuk kesadaran manusia tentang realitas sosial. Dalam kerangka ini, penindasan bukan sekadar praktik eksploitasi material, tetapi juga mekanisme produksi pengetahuan dan makna yang menormalisasi dominasi. Perspektif ini membuka ruang analisis bahwa pembebasan manusia tidak cukup dilakukan melalui perubahan struktur politik semata, tetapi juga melalui transformasi kesadaran sosial yang memungkinkan manusia memahami dan menantang struktur dominasi tersebut. Dalam diskursus teologi sosial, pemikiran ini beresonansi dengan gagasan teologi pembebasan yang menempatkan keadilan sebagai fondasi etika sosial dan spiritualitas. Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep keadilan (al-'adl) dan martabat manusia (karāmah al-insān) menjadi basis normatif yang menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat, sehingga segala bentuk penindasan bertentangan dengan prinsip dasar moralitas teologis. Oleh karena itu, kerangka teoretis tentang masyarakat tanpa penindasan perlu memadukan analisis struktural tentang kekuasaan dengan refleksi teologis tentang martabat manusia sebagai subjek moral dalam kehidupan sosial.

Dalam perkembangan teori kritis modern, refleksi tentang pembebasan manusia juga dikembangkan oleh para pemikir seperti Paulo Freire dan Jürgen Habermas. Freire menekankan bahwa penindasan sering kali terjadi melalui proses internalisasi ideologi

dominan yang membuat kelompok tertindas menerima kondisi mereka sebagai sesuatu yang normal. Oleh karena itu, pembebasan membutuhkan proses *conscientization*, yaitu kesadaran kritis yang memungkinkan manusia memahami struktur ketidakadilan yang membentuk kehidupan mereka. Habermas, di sisi lain, mengembangkan konsep rasionalitas komunikatif yang menekankan pentingnya dialog sebagai medium pembebasan sosial. Dalam perspektif ini, masyarakat yang bebas dari penindasan hanya dapat terwujud apabila relasi sosial didasarkan pada komunikasi yang egaliter dan bebas dari dominasi kekuasaan. Pendekatan ini relevan dengan wacana teologi transformatif yang melihat agama tidak hanya sebagai sistem keyakinan normatif, tetapi juga sebagai sumber etika dialogis yang mendorong terciptanya solidaritas sosial dan keadilan kolektif. Dengan demikian, kerangka teoretis mengenai masyarakat tanpa penindasan perlu mengintegrasikan dimensi struktural, dialogis, dan spiritual dalam memahami proses transformasi sosial. Dalam konteks ini, pemikiran Freire dan Habermas memberikan landasan teoritis penting untuk memahami bagaimana perubahan sosial dapat terjadi melalui transformasi kesadaran dan praktik komunikasi yang egaliter dalam masyarakat.

Selain pendekatan teori kritis, refleksi tentang pembebasan manusia juga berkembang dalam tradisi psikologi humanistik dan eksistensial yang menekankan dimensi subjektivitas manusia dalam kehidupan sosial. Pemikiran Carl Rogers, sebagai salah satu tokoh utama psikologi humanistik, memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara perkembangan individu dan lingkungan sosial. Rogers berargumen bahwa manusia memiliki kecenderungan inheren menuju aktualisasi diri (*actualizing tendency*) yang mendorong individu untuk berkembang secara kreatif dan autentik apabila berada dalam lingkungan sosial yang mendukung. Dalam pendekatan *person-centered*, Rogers menekankan tiga kondisi utama yang memungkinkan perkembangan manusia secara optimal: empati, keaslian relasional (*congruence*), dan penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*). Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam praktik psikoterapi, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam membangun lingkungan sosial yang memungkinkan manusia berkembang secara bebas dan bermartabat. Dalam literatur psikologi kontemporer, pendekatan Rogers dipahami sebagai paradigma yang menekankan bahwa perubahan manusia tidak dapat dipaksakan melalui intervensi otoritatif, tetapi harus difasilitasi melalui lingkungan sosial yang memungkinkan individu mengembangkan potensi mereka secara otonom. Stephen Joseph, misalnya, menegaskan bahwa pendekatan *person-centered* menunjukkan bahwa untuk memahami perubahan manusia, fokus analisis harus diarahkan pada kondisi lingkungan sosial yang memungkinkan pertumbuhan manusia, bukan pada upaya memanipulasi individu itu sendiri. (Joseph, 2021) Perspektif ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang pembebasan manusia dari perspektif psikologis, yaitu bahwa masyarakat tanpa penindasan tidak hanya membutuhkan perubahan struktur sosial, tetapi juga transformasi kualitas relasi antar manusia.

Dalam dialog antara teori sosial kritis dan psikologi humanistik, konsep kebebasan manusia menjadi titik temu yang penting dalam membangun kerangka konseptual masyarakat tanpa penindasan. Filsuf eksistensial seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Buber menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk relasional yang membangun identitasnya melalui interaksi dengan orang lain. Sartre memandang kebebasan sebagai kondisi ontologis manusia yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral terhadap sesama, sementara Buber mengembangkan konsep relasi *I-Thou* sebagai model hubungan yang menghargai keberadaan manusia sebagai subjek yang setara. Dalam perspektif ini, penindasan terjadi ketika relasi manusia direduksi menjadi hubungan instrumental yang memandang orang lain sebagai objek. Pendekatan psikologi humanistik Rogers memiliki resonansi kuat dengan gagasan ini, karena menekankan bahwa hubungan empatik dan autentik merupakan prasyarat

bagi perkembangan manusia yang sehat. Dalam perkembangan literatur kontemporer, pendekatan Rogers juga dipahami sebagai kritik terhadap model hierarkis dalam relasi sosial yang cenderung menempatkan individu dalam posisi subordinatif. Dalam analisis terbaru tentang psikologi humanistik, para peneliti menunjukkan bahwa pendekatan Rogers dapat dipahami sebagai “revolusi sosial yang tenang” yang menantang struktur relasi kekuasaan yang hierarkis dengan menempatkan hubungan manusia yang autentik sebagai fondasi perubahan sosial (Krikorian, 2023). Dengan demikian, integrasi antara filsafat eksistensial dan psikologi humanistik memungkinkan lahirnya kerangka teoretis yang memahami pembebasan manusia sebagai proses transformasi relasi sosial yang memungkinkan manusia saling mengakui martabat eksistensial satu sama lain.

Dalam konteks teologi, refleksi tentang masyarakat tanpa penindasan juga berkembang dalam berbagai tradisi pemikiran yang menekankan dimensi etika dan spiritualitas dalam perubahan sosial. Dalam teologi Islam, misalnya, konsep keadilan (al-‘adl), rahmat (rahmah), dan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insāniyyah) menjadi fondasi normatif bagi pembangunan masyarakat yang egaliter dan humanistik. Pemikiran para teolog kontemporer menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengandung prinsip moral individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas dalam membangun struktur masyarakat yang adil. Dalam perspektif ini, agama tidak dipahami sebagai sistem dogma yang statis, tetapi sebagai sumber inspirasi etis yang mendorong transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih manusiawi. Dalam diskursus global tentang agama dan perubahan sosial, banyak penelitian terbaru menunjukkan bahwa spiritualitas dapat memainkan peran penting dalam membentuk motivasi moral individu untuk terlibat dalam perjuangan keadilan sosial. Integrasi antara dimensi spiritual dan psikologis dalam memahami perubahan manusia juga mulai mendapat perhatian dalam literatur akademik kontemporer, khususnya dalam bidang psikologi spiritualitas dan studi agama. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengalaman religius dapat berfungsi sebagai sumber energi moral yang memperkuat kesadaran manusia tentang tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dengan demikian, teologi transformatif dapat dipahami sebagai kerangka normatif yang memberikan orientasi moral bagi upaya membangun masyarakat tanpa penindasan.

Berdasarkan dialog antara teori sosial kritis, filsafat eksistensial, psikologi humanistik, dan teologi transformatif tersebut, artikel ini mengusulkan kerangka konseptual integratif untuk memahami masyarakat tanpa penindasan sebagai hasil dari tiga proses transformasi yang saling terkait: transformasi struktur sosial, transformasi kesadaran manusia, dan transformasi relasi antar manusia. Transformasi struktur sosial berkaitan dengan perubahan sistem kekuasaan yang menghasilkan ketimpangan dan dominasi dalam masyarakat. Transformasi kesadaran manusia berkaitan dengan proses pembentukan kesadaran moral dan eksistensial yang memungkinkan individu memahami dan menolak struktur penindasan. Sementara itu, transformasi relasi sosial berkaitan dengan penciptaan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia berinteraksi secara empatik, egaliter, dan autentik. Dalam kerangka ini, psikologi humanistik Carl Rogers memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana kualitas relasi sosial dapat memfasilitasi perkembangan manusia secara bebas dan kreatif. Sementara itu, teologi transformatif memberikan fondasi normatif yang menegaskan bahwa pembebasan manusia merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam kehidupan sosial. Integrasi kedua perspektif ini menghasilkan paradigma baru tentang perubahan sosial yang tidak hanya menekankan transformasi struktural, tetapi juga pembangunan ekosistem sosial yang memungkinkan manusia berkembang sebagai makhluk yang bebas, bermartabat, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kerangka teoretis yang dikembangkan dalam artikel ini menempatkan masyarakat tanpa penindasan bukan sekadar sebagai kondisi sosial yang

bebas dari dominasi, tetapi sebagai tatanan kehidupan bersama yang memungkinkan realisasi penuh potensi kemanusiaan dalam dimensi sosial, moral, dan spiritual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual-interpretatif yang berfokus pada analisis integratif antara teks keagamaan, tradisi intelektual Islam klasik, dan teori psikologi humanistik kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hipotesis empiris secara statistik, melainkan untuk merekonstruksi paradigma teoretis mengenai masyarakat tanpa penindasan melalui dialog antara teologi transformatif dan psikologi humanistik Carl Rogers. Dalam kajian ilmu sosial dan keagamaan kontemporer, pendekatan kualitatif interpretatif sering digunakan untuk memahami makna normatif dan konseptual yang terkandung dalam teks maupun tradisi intelektual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi relasi antara struktur sosial, kesadaran manusia, dan nilai moral yang membentuk kehidupan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga relevan untuk mengkaji fenomena sosial yang memiliki dimensi spiritual dan filosofis yang kompleks, seperti konsep keadilan, martabat manusia, dan pembebasan sosial. Dalam literatur psikologi humanistik kontemporer, pendekatan interpretatif juga dianggap penting untuk memahami pengalaman manusia sebagai subjek eksistensial yang tidak dapat direduksi menjadi data kuantitatif semata. Stephen Joseph, misalnya, menekankan bahwa pendekatan *person-centered* yang dikembangkan Carl Rogers berangkat dari asumsi bahwa perubahan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan relasi interpersonal yang membentuk pengalaman manusia secara keseluruhan. (Joseph, 2021) Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif interpretatif dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara dimensi teologis, psikologis, dan sosial dalam memahami konsep masyarakat tanpa penindasan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi teks-teks normatif dalam tradisi Islam seperti Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi dasar teologis bagi konsep keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial, kebebasan manusia, dan solidaritas kemanusiaan dianalisis sebagai landasan normatif bagi pembangunan masyarakat yang bebas dari penindasan. Selain itu, hadis Nabi juga digunakan untuk memperkuat argumentasi teologis tentang etika sosial dalam Islam, khususnya terkait prinsip keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Di samping teks normatif tersebut, penelitian ini juga menggunakan karya-karya klasik dalam tradisi intelektual Islam, seperti tulisan para teolog, filsuf, dan sufi yang membahas relasi antara manusia, kebebasan, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial. Pemikiran para tokoh klasik tersebut menjadi sumber penting untuk memahami bagaimana tradisi intelektual Islam memandang konsep keadilan sosial dan pembebasan manusia dalam perspektif teologis dan filosofis. Sementara itu, sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri atas literatur akademik kontemporer yang membahas teori perubahan sosial, psikologi humanistik, dan teologi transformatif. Literatur tersebut meliputi artikel jurnal internasional bereputasi, buku akademik, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Penggunaan literatur mutakhir memungkinkan penelitian ini memposisikan analisisnya dalam diskursus global tentang hubungan antara agama, psikologi, dan perubahan sosial.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian konseptual dalam bidang teologi dan filsafat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk

mengakses berbagai sumber tekstual yang relevan dengan tema penelitian, baik berupa teks klasik maupun literatur akademik kontemporer. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan data, tetapi juga sebagai proses analisis intelektual yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan konseptual antara berbagai teori dan tradisi pemikiran. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi sumber literatur yang relevan, seleksi literatur berdasarkan kredibilitas akademik dan relevansi tematik, serta pengorganisasian data tekstual yang berkaitan dengan konsep penindasan, pembebasan manusia, dan transformasi sosial. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria akademik tertentu, seperti reputasi jurnal, relevansi dengan topik penelitian, serta kontribusi teoritis terhadap diskursus tentang psikologi humanistik dan perubahan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan praktik penelitian konseptual dalam ilmu sosial dan humaniora yang menekankan pentingnya dialog kritis antara berbagai tradisi intelektual untuk menghasilkan kerangka teoretis baru.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hermeneutik-kritis yang bertujuan untuk memahami makna konseptual yang terkandung dalam teks serta hubungan antara konsep-konsep yang dianalisis. Pendekatan hermeneutik dipilih karena penelitian ini melibatkan interpretasi terhadap teks-teks normatif dan filosofis yang memiliki dimensi makna yang kompleks dan kontekstual. Dalam tradisi penelitian teologi dan filsafat, hermeneutika digunakan untuk memahami bagaimana teks keagamaan dan pemikiran intelektual dapat ditafsirkan kembali dalam konteks sosial yang berbeda. Analisis hermeneutik dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu interpretasi tekstual terhadap sumber primer, analisis konseptual terhadap teori-teori yang relevan, serta sintesis argumentatif yang menghubungkan berbagai konsep tersebut dalam kerangka teoretis yang koheren. Pendekatan hermeneutik-kritis juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara reflektif bagaimana konsep keadilan, kebebasan, dan martabat manusia dipahami dalam berbagai tradisi pemikiran. Dalam konteks psikologi humanistik, pendekatan interpretatif ini juga digunakan untuk memahami bagaimana konsep *actualizing tendency* dan *fully functioning person* dalam teori Rogers dapat diterapkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian terbaru dalam psikologi humanistik menunjukkan bahwa pendekatan Rogers tidak hanya relevan dalam konteks terapi individual, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam memahami relasi sosial yang mendukung perkembangan manusia secara kolektif (Cavé et al., 2024). Dengan demikian, analisis hermeneutik-kritis dalam penelitian ini memungkinkan integrasi antara perspektif teologis dan psikologis dalam membangun kerangka konseptual masyarakat tanpa penindasan.

Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan epistemologis bahwa fenomena penindasan sosial dan pembebasan manusia tidak dapat dipahami secara memadai melalui pendekatan empiris yang bersifat reduksionis. Konsep seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan kesadaran moral memiliki dimensi normatif dan filosofis yang memerlukan pendekatan interpretatif dan reflektif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif konseptual yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap dimensi etika, spiritualitas, dan psikologi dalam memahami perubahan sosial. Selain itu, metode ini juga memungkinkan dialog interdisipliner antara teologi, filsafat, dan psikologi dalam membangun paradigma baru tentang masyarakat tanpa penindasan. Dalam literatur akademik kontemporer, pendekatan interdisipliner semakin dianggap penting untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, karena realitas sosial tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui satu disiplin ilmu saja. Dalam konteks psikologi humanistik, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pendekatan *person-centered* perlu dipahami dalam konteks komunitas dan struktur sosial yang lebih luas, bukan hanya dalam hubungan terapeutik individual (Doyle, 2025). Dengan demikian, metode

penelitian yang digunakan dalam artikel ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji konsep secara deskriptif, tetapi juga untuk membangun sintesis teoretis baru yang menghubungkan dimensi teologis, psikologis, dan sosial dalam memahami kemungkinan terciptanya masyarakat yang bebas dari penindasan.

HASIL

Realitas penindasan dalam masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena ekonomi atau politik, tetapi sebagai konstruksi sosial yang melibatkan dimensi struktural, kultural, dan psikologis sekaligus. Dalam kerangka konseptual yang dikembangkan dalam artikel ini, masyarakat tanpa penindasan dipahami sebagai kondisi sosial di mana relasi manusia tidak lagi dibangun atas dasar dominasi dan subordinasi, melainkan atas dasar pengakuan terhadap martabat eksistensial setiap individu. Dalam perspektif teologi Islam, konsep ini memiliki akar normatif yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an yang menegaskan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan martabat yang luhur. Al-Qur'an menyatakan: *وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ* ("Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam") (Q.S. al-Isrā' [17]: 70). Ayat ini tidak hanya menegaskan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, tetapi juga memberikan dasar teologis bagi penolakan terhadap segala bentuk penindasan yang merendahkan martabat manusia. Dalam tafsir klasik, seperti yang dijelaskan oleh al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr, kemuliaan manusia dipahami sebagai pemberian ilahi yang mencakup kebebasan moral dan kemampuan rasional manusia untuk menentukan tindakan etisnya. Dengan demikian, penindasan terhadap manusia bukan hanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip teologis tentang kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dalam perspektif teori sosial modern, analisis mengenai penindasan sering kali dikaitkan dengan relasi kekuasaan yang membentuk struktur sosial. Michel Foucault, misalnya, menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi politik atau ekonomi, tetapi juga melalui diskursus yang membentuk cara manusia memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Dalam konteks ini, penindasan dapat terjadi ketika sistem pengetahuan dan norma sosial menciptakan hierarki yang menempatkan kelompok tertentu dalam posisi subordinatif. Perspektif ini relevan dengan realitas masyarakat modern di mana dominasi tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk kontrol simbolik yang memengaruhi cara manusia memandang identitas dan posisinya dalam masyarakat. Penelitian terbaru dalam bidang teori sosial menunjukkan bahwa struktur dominasi dalam masyarakat modern sering kali bersifat subtil dan tersembunyi dalam praktik budaya serta sistem institusional yang tampak netral (Kaaristo, 2022). Oleh karena itu, upaya menciptakan masyarakat tanpa penindasan tidak hanya membutuhkan perubahan struktur politik atau ekonomi, tetapi juga transformasi kesadaran sosial yang memungkinkan manusia memahami dan menantang mekanisme dominasi yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tradisi teologi Islam, refleksi tentang keadilan sosial juga memiliki dimensi praksis yang kuat. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam ayat: *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ* (Q.S. al-Nahl [16]: 90). Ayat ini sering dipahami oleh para mufasir sebagai prinsip universal yang menuntut manusia untuk membangun kehidupan sosial yang adil dan penuh kasih sayang. Dalam tafsir al-Rāzī dan al-Qurṭubī, konsep keadilan dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial yang melibatkan distribusi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Perspektif ini menunjukkan

bahwa teologi Islam memiliki potensi transformatif dalam membangun etika sosial yang menolak segala bentuk penindasan. Dalam konteks masyarakat modern, nilai-nilai teologis tersebut dapat menjadi sumber inspirasi moral bagi gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.

Selain dimensi teologis, pembahasan mengenai masyarakat tanpa penindasan juga perlu mempertimbangkan dimensi psikologis yang membentuk kesadaran manusia. Dalam psikologi humanistik, Carl Rogers menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami menuju aktualisasi diri apabila berada dalam lingkungan sosial yang mendukung perkembangan tersebut. Rogers menyebut kecenderungan ini sebagai *actualizing tendency*, yaitu dorongan fundamental dalam diri manusia untuk berkembang secara kreatif dan autentik. Namun, potensi tersebut sering kali terhambat oleh kondisi sosial yang represif atau relasi interpersonal yang tidak empatik. Dalam lingkungan sosial yang menekan, individu dapat mengalami alienasi psikologis yang membuat mereka kehilangan kemampuan untuk mengembangkan potensi diri secara bebas. Penelitian kontemporer dalam psikologi menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung empati dan penerimaan tanpa syarat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis serta kemampuan individu untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan sosial. (Joseph, 2021) Dengan demikian, penciptaan masyarakat tanpa penindasan tidak hanya membutuhkan perubahan struktur sosial, tetapi juga pembangunan lingkungan relasional yang memungkinkan manusia berkembang secara psikologis.

Pendekatan Rogers memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana relasi interpersonal dapat menjadi medium transformasi sosial. Dalam pendekatan *person-centered*, hubungan yang empatik dan autentik dianggap sebagai prasyarat bagi perkembangan manusia yang sehat. Rogers berargumen bahwa manusia akan berkembang secara optimal apabila mereka merasa dihargai dan diterima sebagai individu yang bermartabat. Prinsip ini memiliki implikasi sosial yang luas, karena menunjukkan bahwa struktur masyarakat yang hierarkis dan represif dapat menghambat perkembangan manusia secara psikologis. Dalam konteks ini, pendekatan Rogers dapat dipahami sebagai kritik terhadap sistem sosial yang menempatkan individu dalam relasi dominasi dan subordinasi. Penelitian terbaru dalam psikologi humanistik menunjukkan bahwa pendekatan *person-centered* tidak hanya relevan dalam konteks terapi individual, tetapi juga dapat diterapkan dalam pendidikan, organisasi sosial, dan pembangunan komunitas yang lebih humanistik. (Cavé et al., 2024) Hal ini menunjukkan bahwa paradigma psikologi humanistik dapat menjadi salah satu fondasi teoretis bagi pembangunan masyarakat yang bebas dari penindasan.

Dalam dialog antara teologi Islam dan psikologi humanistik, konsep empati memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun relasi sosial yang egaliter. Dalam tradisi Islam, empati dan solidaritas sosial tercermin dalam konsep *rahmah* (kasih sayang) yang menjadi salah satu nilai utama dalam etika sosial Islam. Al-Qur'an menggambarkan Nabi Muhammad sebagai figur yang membawa rahmat bagi seluruh alam: *وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ* (Q.S. al-Anbiyā' [21]: 107). Ayat ini menunjukkan bahwa misi profetik dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan penyampaian wahyu, tetapi juga dengan transformasi sosial yang didasarkan pada nilai kasih sayang dan solidaritas kemanusiaan. Dalam tafsir kontemporer, konsep *rahmah* sering dipahami sebagai prinsip etika sosial yang menuntut manusia untuk membangun hubungan yang penuh empati dan penghargaan terhadap martabat orang lain. Perspektif ini memiliki kesamaan dengan pendekatan Rogers yang menekankan pentingnya empati dalam relasi interpersonal.

Integrasi antara nilai teologis dan prinsip psikologi humanistik membuka kemungkinan baru dalam memahami proses perubahan sosial. Dalam kerangka ini, masyarakat tanpa penindasan tidak hanya dipahami sebagai hasil dari revolusi politik atau perubahan struktur ekonomi, tetapi juga sebagai hasil dari transformasi kesadaran manusia yang menempatkan empati, keadilan, dan martabat manusia sebagai fondasi relasi sosial. Perspektif ini menantang paradigma perubahan sosial yang terlalu menekankan aspek struktural tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis dan spiritual manusia. Penelitian terbaru dalam studi agama dan psikologi menunjukkan bahwa pengalaman spiritual dapat berfungsi sebagai sumber motivasi moral yang mendorong individu untuk terlibat dalam perjuangan keadilan sosial (Susmerano & Hodge, 2025). Dengan demikian, integrasi antara teologi dan psikologi humanistik dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana perubahan sosial dapat terjadi secara lebih holistik.

Dalam konteks perdebatan akademik global, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teologi, psikologi, dan teori sosial semakin mendapatkan perhatian dalam studi tentang perubahan sosial. Para sarjana mulai menyadari bahwa fenomena penindasan tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui satu disiplin ilmu saja, karena realitas sosial bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, pengembangan paradigma masyarakat tanpa penindasan memerlukan dialog antara berbagai tradisi intelektual yang mampu menjelaskan dimensi struktural, kultural, dan psikologis dari kehidupan manusia. Artikel ini berkontribusi pada diskursus tersebut dengan mengusulkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teologi transformatif dan psikologi humanistik sebagai dasar normatif dan psikologis bagi perubahan sosial.

Dengan demikian, masyarakat tanpa penindasan dapat dipahami sebagai tatanan sosial yang memungkinkan manusia berkembang secara bebas, bermartabat, dan autentik dalam relasi sosial yang egaliter. Dalam kerangka ini, perubahan sosial tidak hanya berkaitan dengan transformasi struktur kekuasaan, tetapi juga dengan pembangunan budaya empati dan solidaritas yang memungkinkan manusia saling mengakui martabat eksistensial satu sama lain. Integrasi antara nilai teologis Islam dan prinsip psikologi humanistik memberikan dasar teoretis yang kuat bagi pembangunan paradigma sosial yang lebih humanistik dan inklusif. Paradigma ini menegaskan bahwa pembebasan manusia bukan hanya proyek politik atau ekonomi, tetapi juga proyek moral dan spiritual yang menuntut transformasi kesadaran manusia dalam membangun kehidupan bersama yang adil dan bermartabat.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai masyarakat tanpa penindasan dalam artikel ini mengarah pada sebuah interpretasi utama bahwa transformasi sosial yang berkelanjutan tidak dapat direduksi hanya pada perubahan struktur kekuasaan, tetapi harus melibatkan transformasi kesadaran manusia yang bersifat moral, spiritual, dan psikologis sekaligus. Dalam kerangka ini, penindasan dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya muncul melalui sistem politik dan ekonomi yang tidak adil, tetapi juga melalui pola relasi sosial dan konstruksi kesadaran yang membentuk cara manusia memahami dirinya dan orang lain. Perspektif ini menggabungkan tiga lapisan analisis utama: dimensi normatif-teologis, dimensi psikologis-humanistik, dan dimensi struktural-sosial. Dalam tradisi teologi Islam, prinsip martabat manusia yang ditegaskan dalam ayat *وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ* (Q.S. al-Isrā' [17]: 70) memberikan dasar normatif bagi konsep masyarakat yang bebas dari penindasan. Namun, interpretasi teologis tersebut perlu dikontekstualisasikan dengan realitas sosial modern yang menunjukkan bahwa ketidakadilan sering kali muncul dalam bentuk struktur sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan integratif antara teologi transformatif dan psikologi humanistik memungkinkan reinterpretasi konsep keadilan sosial tidak hanya sebagai norma

etis, tetapi sebagai proses transformasi kesadaran kolektif yang memungkinkan manusia membangun relasi sosial yang lebih egaliter.

Interpretasi ini menunjukkan bahwa konsep masyarakat tanpa penindasan tidak dapat dipahami sebagai kondisi utopis yang statis, tetapi sebagai proses historis yang melibatkan perubahan dalam cara manusia membangun relasi sosial. Dalam konteks psikologi humanistik, Carl Rogers menekankan bahwa manusia memiliki potensi inheren untuk berkembang menuju aktualisasi diri apabila berada dalam lingkungan yang mendukung perkembangan tersebut. Prinsip *actualizing tendency* yang dikembangkan Rogers menunjukkan bahwa potensi pembebasan manusia tidak hanya bergantung pada perubahan struktur sosial, tetapi juga pada kualitas relasi interpersonal yang memungkinkan manusia berkembang secara autentik. Penelitian terbaru dalam psikologi humanistik menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung empati dan penerimaan tanpa syarat memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan individu serta kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara konstruktif. (Joseph, 2021) Dengan demikian, konsep masyarakat tanpa penindasan dapat dipahami sebagai ekosistem sosial yang memungkinkan berkembangnya potensi manusia secara kolektif melalui relasi yang empatik, dialogis, dan egaliter.

Apabila dibandingkan dengan studi global mengenai pembebasan sosial, pendekatan yang dikembangkan dalam artikel ini memiliki kesamaan dengan berbagai paradigma kritis yang berkembang dalam ilmu sosial kontemporer. Dalam teori kritis, misalnya, para sarjana menekankan bahwa penindasan sering kali diproduksi melalui relasi kekuasaan yang terinstitusionalisasi dalam sistem sosial. Namun, sebagian besar teori tersebut cenderung menekankan dimensi struktural tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap dimensi psikologis dan spiritual manusia. Pendekatan integratif yang dikembangkan dalam artikel ini menawarkan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari transformasi kesadaran manusia sebagai subjek moral. Dalam konteks ini, integrasi antara teologi transformatif dan psikologi humanistik memungkinkan lahirnya paradigma pembebasan yang tidak hanya berfokus pada perubahan struktur kekuasaan, tetapi juga pada pembangunan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan manusia secara holistik. Penelitian terbaru dalam studi agama dan perubahan sosial juga menunjukkan bahwa spiritualitas dapat berfungsi sebagai sumber motivasi moral yang mendorong individu untuk terlibat dalam perjuangan keadilan sosial. (Susmerano & Hodge, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara dimensi spiritual dan psikologis memiliki potensi besar dalam memperkaya teori perubahan sosial dalam konteks global.

Perbandingan dengan studi global juga menunjukkan bahwa pendekatan humanistik yang dikembangkan Rogers memiliki relevansi yang luas dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Dalam literatur psikologi kontemporer, pendekatan *person-centered* telah diterapkan tidak hanya dalam praktik terapi, tetapi juga dalam pendidikan, resolusi konflik, dan pembangunan komunitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog empatik sebagai sarana untuk membangun relasi sosial yang lebih inklusif dan egaliter. Dalam konteks masyarakat multikultural, prinsip empati dan penerimaan tanpa syarat menjadi sangat penting untuk mengatasi konflik sosial yang sering kali dipicu oleh perbedaan identitas budaya, agama, atau etnis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan dialogis yang berbasis empati dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola konflik secara konstruktif serta membangun solidaritas sosial yang lebih kuat (Cavé et al., 2024). Dengan demikian, paradigma psikologi humanistik memiliki implikasi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan bebas dari penindasan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosial dalam memahami proses pembebasan manusia. Dalam kerangka ini, masyarakat tanpa penindasan dipahami sebagai hasil dari interaksi antara tiga proses transformasi utama: transformasi struktur sosial, transformasi kesadaran moral, dan transformasi relasi interpersonal. Transformasi struktur sosial berkaitan dengan perubahan institusi dan sistem kekuasaan yang menghasilkan ketimpangan dalam masyarakat. Transformasi kesadaran moral berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai etis yang menolak dominasi dan eksploitasi. Sementara itu, transformasi relasi interpersonal berkaitan dengan penciptaan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia berinteraksi secara empatik dan autentik. Integrasi ketiga dimensi ini menghasilkan paradigma perubahan sosial yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan yang hanya menekankan satu aspek tertentu. Dalam diskursus akademik global, pendekatan interdisipliner semacam ini semakin dianggap penting untuk memahami kompleksitas fenomena sosial dalam masyarakat modern (Aktar & Alam, 2021).

Selain kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil dan humanistik. Dalam konteks pendidikan, misalnya, prinsip-prinsip psikologi humanistik dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Pendekatan pendidikan yang berbasis empati dan penghargaan terhadap martabat individu dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran kritis tentang keadilan sosial serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks komunitas religius, nilai-nilai teologis tentang keadilan dan kasih sayang dapat menjadi sumber inspirasi bagi gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak kelompok marginal. Sebagai contoh, berbagai komunitas keagamaan di berbagai negara telah mengembangkan program pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural melalui pendekatan yang menggabungkan spiritualitas dan aksi sosial.

Implikasi praktis lainnya dapat dilihat dalam bidang pembangunan komunitas dan resolusi konflik. Dalam masyarakat yang mengalami konflik sosial atau ketegangan antar kelompok, pendekatan dialogis yang berbasis empati dapat menjadi strategi efektif untuk membangun kembali kepercayaan sosial. Prinsip empati yang dikembangkan dalam psikologi humanistik dapat diterapkan dalam program mediasi konflik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan dialogis tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai proses transformasi relasi sosial yang memungkinkan terciptanya pemahaman bersama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan dialogis yang berbasis empati dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengatasi konflik secara damai dan membangun solidaritas sosial yang lebih inklusif (Doyle, 2025).

Dalam dinamika kontekstual masyarakat kontemporer, konsep masyarakat tanpa penindasan juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan perubahan global yang memengaruhi kehidupan manusia. Globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan transformasi ekonomi global telah menciptakan bentuk-bentuk baru ketimpangan sosial yang tidak selalu terlihat secara langsung. Dalam konteks ini, penindasan tidak hanya muncul dalam bentuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga dalam bentuk marginalisasi digital, diskriminasi kultural, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya pengetahuan. Oleh karena itu, paradigma pembebasan sosial perlu diperluas untuk mencakup dimensi-dimensi baru dari ketidakadilan yang muncul dalam masyarakat global. Pendekatan integratif yang menggabungkan teologi transformatif dan psikologi humanistik memberikan kerangka

konseptual yang fleksibel untuk memahami dinamika tersebut, karena menempatkan manusia sebagai pusat dari proses perubahan sosial.

Dengan demikian, kedalaman analisis yang dikembangkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa penciptaan masyarakat tanpa penindasan merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara struktur sosial, kesadaran manusia, dan relasi interpersonal. Pendekatan integratif yang menggabungkan teologi Islam dan psikologi humanistik memungkinkan lahirnya paradigma baru tentang pembebasan manusia yang tidak hanya berfokus pada perubahan institusional, tetapi juga pada pembangunan budaya empati dan solidaritas. Paradigma ini menegaskan bahwa transformasi sosial yang berkelanjutan hanya dapat terjadi apabila manusia mampu mengembangkan kesadaran moral dan spiritual yang mendorong mereka untuk membangun relasi sosial yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana paradigma masyarakat tanpa penindasan dapat direkonstruksi melalui integrasi antara teologi transformatif dalam tradisi Islam dan psikologi humanistik–eksistensial Carl Rogers. Berdasarkan analisis konseptual yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tanpa penindasan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan struktur sosial atau politik, tetapi sebagai transformasi multidimensional yang melibatkan dimensi moral, spiritual, dan psikologis manusia. Perspektif teologi Islam menegaskan bahwa martabat manusia (*karāmah al-insān*) dan prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan fondasi normatif bagi kehidupan sosial yang egaliter. Sementara itu, psikologi humanistik Rogers menekankan pentingnya lingkungan relasional yang empatik, autentik, dan bebas dari dominasi sebagai prasyarat bagi perkembangan manusia secara optimal. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat tanpa penindasan hanya dapat terwujud melalui sinergi antara transformasi struktur sosial dan transformasi kesadaran manusia yang menempatkan empati, kebebasan, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai dasar relasi sosial.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan teologi transformatif, psikologi humanistik, dan teori sosial dalam memahami proses pembebasan manusia dari struktur penindasan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung menekankan perubahan struktural atau ideologis semata, penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan manusia juga memerlukan transformasi dalam kualitas relasi interpersonal dan lingkungan sosial yang membentuk kesadaran manusia. Integrasi antara nilai-nilai teologis Islam dan prinsip-prinsip psikologi humanistik memberikan perspektif baru dalam diskursus akademik global tentang perubahan sosial, khususnya dalam menghubungkan dimensi spiritualitas dengan dinamika psikologis manusia dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan interdisipliner dalam studi teologi, filsafat sosial, dan psikologi yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses transformasi masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi paradigma masyarakat tanpa penindasan melalui dialog konseptual antara dua tradisi intelektual yang jarang dipertemukan secara sistematis, yaitu teologi Islam dan psikologi humanistik Carl Rogers. Pendekatan ini menghasilkan model teoretis yang memandang perubahan sosial sebagai proses transformasi yang berlangsung secara simultan pada tiga level: struktur sosial, kesadaran moral, dan relasi interpersonal. Paradigma ini memperluas pemahaman tentang pembebasan manusia dengan menempatkan empati, kesadaran spiritual, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai fondasi bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil

dan humanistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian teologi sosial dalam konteks Islam, tetapi juga memberikan kontribusi bagi diskursus global tentang hubungan antara spiritualitas, psikologi, dan perubahan sosial dalam masyarakat modern.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian ini bersifat konseptual dan berbasis studi kepustakaan sehingga belum melibatkan data empiris yang dapat menguji secara langsung penerapan kerangka teoretis yang dikembangkan. Kedua, fokus penelitian yang lebih menekankan integrasi antara teologi Islam dan psikologi humanistik membuat eksplorasi terhadap perspektif teoritis lain dalam studi pembebasan sosial belum dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris yang menguji bagaimana prinsip-prinsip teologi transformatif dan psikologi humanistik dapat diterapkan dalam konteks sosial tertentu, seperti pendidikan, pembangunan komunitas, atau gerakan sosial berbasis agama. Selain itu, riset di masa depan juga dapat memperluas dialog interdisipliner dengan melibatkan perspektif teori kritis, sosiologi agama, dan studi spiritualitas kontemporer untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana masyarakat tanpa penindasan dapat diwujudkan dalam dinamika masyarakat global yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktar, Most. A., & Alam, Md. M. (2021). Cultural Inequality and Sustainable Development (pp. 66–78). https://doi.org/10.1007/978-3-319-95882-8_5
- Cavé, J., Katjene, M., & Roos, V. (2024). A scoping review of Rogers' person-centred approach to identify constructs relevant to optimal intergenerational relationships. *South African Journal of Psychology*, 54(3), 402–414. <https://doi.org/10.1177/00812463241265588>
- Dewi, M. R., & Fauzi, A. (2025). Aligning Humanistic Psychology and Islamic Education: A Theoretical Dialogue between Carl Rogers and Abraham Maslow. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 10(2), 236–246. <https://doi.org/10.15575/atthulab.v10i2.52273>
- Doyle, R. (2025). Beyond the individual in the person-centered approach. *Person-Centered & Experiential Psychotherapies*, 24(4), 370–378. <https://doi.org/10.1080/14779757.2025.2530600>
- Joseph, S. (2021). How Humanistic Is Positive Psychology? Lessons in Positive Psychology From Carl Rogers' Person-Centered Approach—It's the Social Environment That Must Change. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.709789>
- Kaaristo, M. (2022). Everyday power dynamics and hierarchies in qualitative research: The role of humour in the field. *Qualitative Research*, 22(5), 743–760. <https://doi.org/10.1177/14687941221096597>
- Krikorian, M. (2023). Carl Rogers: A Person-Centered Approach. In *The Palgrave Handbook of Educational Thinkers* (pp. 1–13). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81037-5_106-1
- Martin, J. (2025). Carl Rogers' struggle to be “real” and its implications for understanding psychologists' life–work connections and sociocultural impact. *Theory & Psychology*, 35(2), 246–265. <https://doi.org/10.1177/09593543251324158>
- Susmerano, E. B., & Hodge, D. R. (2025). Spirituality as a Facilitator of Social Justice Advocacy: Practice and Educational Insights From the Philippine People Power



Revolution. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services.
<https://doi.org/10.1177/10443894251377495>